

BAB IV

PENERAPAN DAN PECAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, jenis pelayanan dasar pendidikan yang dikelola oleh kabupaten/kota terdiri dari :

1. Pendidikan Anak Usia Dini
2. Pendidikan Dasar
3. Pendidikan Kesetaraan

Penerima Pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan yang dikelola kabupaten dengan ketentuan Pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik yang berusia 5 tahun sampai dengan 6 tahun, penerima jenis layanan Pendidikan dasar merupakan peserta didik yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun dan penerima jenis layanan Pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 sampai dengan 18 tahun.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang- kurangnya memuat:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu warga negara, dengan ketentuan :

1. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;
2. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar; dan
3. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.

4.1.2. Target Capaian SPM

TABEL 4.1
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

1	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI	TARGET CAPAIAN (5) : (4) X 100%	RENCANA ANGGARAN		
						ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REFOCUSING	ANGGARAN PERUBAHAN
2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Pendidikan anak usia dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	49.230	40.918	83,12%	2.914.160.000	1.628.660.000	1.632.780.000
2	pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	203.490	203.166	99,84%	217.695.296.000	188.436.432.000	215.438.821.000



3	pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	2.505	2.436	97,25%	9.466.915.000	6.165.294.000	6.165.294.000
---	-----------------------	---	-------	-------	--------	---------------	---------------	---------------



Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada awal perencanaan SPM Pendidikan, Kabupaten Tegal menargetkan 83,12% anak pada usia 5-8 tahun mendapatkan pelayanan PAUD, 99,84% anak usia 7-15 tahun mendapatkan pelayanan Pendidikan dasar dan 97,25 % anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasarnya mendapatkan pelayanan Pendidikan kesetaraan.

Melihat tabel di atas pada kolom anggaran terbagi menjadi 3 yaitu anggaran awal, anggaran refocusing dan anggaran perubahan. Hal ini dikarenakan pada awal tahun yaitu bulan Februari 2020, di Indonesia sedang mewabah penyakit yang disebabkan oleh virus covid-19. Baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tidak terkecuali pemerintah Kabupaten Tegal, mengalokasikan Sebagian besar anggarannya untuk penanganan pandemic ini. Oleh karena itu ada kolom berisi anggaran refocusing, dimana anggarannya terpangkas untuk penanganan pandemic. Namun menjelang trimester ketiga Pemerintah Kabupaten Tegal melakukan perubahan pada APBD 2020 untuk dapat memenuhi target kinerja.



4.1.3. Realisasi SPM

TABEL 4.2
Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET CAPAIAN SPM		REALISASI SPM			REALISASI CAPAIAN (6):(4)X100%
			JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	RENCANA ANGGARAN	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	REALISASI ANGGARAN		
						APBD	APBD PROV/ APBN/ SUMBER LAIN YANG SAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pendidikan anak usia dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	49.230	1.632.780.000	40.918	1.084.159.451	-	83,12%
2	pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	203.490	215.438.821.000	203.166	58.755.744.301	155.464.189.000	99,84%



3	pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	2.505	6.165.294.000	2.436	5.986.192.986	-	97,25%
---	-----------------------	---	-------	---------------	-------	---------------	---	--------



Berdasarkan tabel di atas presentase capaian keterlayanan PAUD sebesar 83,12%, Pendidikan dasar 99,84% dan Pendidikan kesetaraan 97,25%. Hal ini membuktikan bahwa penerapan SPM Pendidikan di Kabupaten Tegal sudah cukup baik di atas 80%.

Pada jenis pelayanan Pendidikan dasar, Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Dikbud mendapatkan anggaran sebesar Rp 155.464.189.000 yang bersumber dari APBN. Sedangkan untuk jenis pelayanan Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan kesetaraan hanya mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Tegal.

4.1.4. Alokasi Anggaran SPM

TABEL 4.3
Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
	Program Sarana dan Prasarana (Dikdas)	
1	Pembangunan RKB, Ruang Perpus, Laboratorium dan Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Kebudayaan	9.786.440.000
2	Manajemen, Pembinaan, Fasilitasi dan Tata Kelola Sarpras Dikbud	1.055.056.000
3	Rehabilitasi Ruang Kelas Ruang penunjuang Lain dan Peningkatan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.495.838.000
4	Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi Sarpras SD (DAK FISIK)	9.326.089.000
5	Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi Sarpras SMP (DAK FISIK)	6.531.107.000
	Program Dikdas	

1	Pemberian Beasiswa SD SMP	1.000.000.000
2	Pelaksanaan Ujian	199.787.000
3	Lomba Kreatifitas, Apresiasi, Pengembangan Minat dan Bakat Siswa SD SMP	45.767.000
	Program Dikdas (Sumber APBN)	
1	Bantuan Operasional Sekolah SD dan SMP	155.464.189.000
	Program PPTK (Dikdas)	
1	Managemen, Pengelolaan, dan pembinaan Pendidikan Dasar	1.547.500.000
2	Managemen, Fasilitasi dan Tata Kelola Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	28.719.030.000
3	Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Guru	80.318.000
4	Penilaian, Pengembangan dan Peningkatan Karier dan Prestasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	187.700.000
	Program Sarana dan Prasarana (PAUD)	
1	Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana PAUD (DAK FISIK)	223.680.000
	Program Sarana dan Prasarana (PPAUDNI)	
1	Penataan Lingkungan dan Sanitasi PAUD/DIKMAS, Pendidikan dan Kebudayaan	3.672.499.000
	Program PPAUDNI	
1	Pengadaan /Pembangunan /Rehabilitasi Sarpras SKB SPNF (DAK FISIK)	2.147.795.000
2	BOP PAUD Negeri (DAK Non Fisik)	129.600.000
3	Penyelenggaraan Semesteran dan Ujian Pendidikan Kesetaraan	184.500.000



4	DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan SKB SPNF Negeri Kab. Tegal (Paket B)	75.000.000
5	DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan SKB SPNF Negeri Kab. Tegal (Paket C)	270.000.000
6	Manajemen, Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Nonformal dan Informal	1.095.000.000

4.1.5. Dukungan Personil

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dalam rangka mendorong pencapaian SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

TABEL 4.4
Kepegawaian

Jumlah Pegawai	56	orang
PNS/CPNS	56	orang
Kualifikasi Pendidikan		
Pasca Sarjana / S2	12	orang
Sarjana / S1, D.IV	27	orang
Ahli Madya / D.III	1	orang
Ahli Muda / D.II	-	orang
Ahli Madya / D.1	-	orang
SMA / SLTA	14	orang
SMP / SLTP	2	orang
Pangkat dan Golongan		
Golongan IV	17	orang



Golongan III	23	orang
Golongan II	16	orang
Golongan I	-	orang
Jumlah Pejabat		
Pejabat Struktural	15	orang
Pejabat Fungsional	41	orang

2.1.5. Permasalahan dan Solusi

TABEL 4.5
Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan masih rendah	Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Pendidik PAUD sehingga mereka mampu untuk mendidik sesuai standar yang diharapkan	Lintas sektoral meliputi Dinas Dikbud, Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu, Kepala Desa, Camat, dan Dinas Perkintaru.
			Sarana Prasarana kurang/belum mencukupi standar minimal	Memberikan bantuan sarana dan prasarana	
			Keberadaan Lembaga PAUD belum merata	Pemberian BOP operasional PAUD	

			Jumlah lembaga PAUD masih kurang tetapi untuk izin pendirian TK persyaratannya melibatkan lintas sektor sehingga pengelola terkesan dipersulit pengurusannya	Mempermudah izin pendirian	
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Angka DO SD dan SMP di masa Pandemi Covid meningkat	Menggencarkan pembelajaran secara Daring dan pendampingan kepada Siswa sesuai prosedur yang telah ditetapkan	
			Angka drop out SD meningkat dari 0,14% di tahun 2019 menjadi 0,48 di tahun 2020	Peningkatan mutu pendidikan	
			Angka drop out SD meningkat dari 0,13% di tahun 2019 menjadi 0,86 di tahun 2020	Pemerataan tenaga pendidik	
			Jumlah Pendidik mencukupi akan tetapi bermasalah pada distribusi/pemerataan Kota dan pelosok desa	Pemberian bantuan sarana dan prasarana Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Menampung mereka yang DO untuk mengikuti	



				program Kejar Paket	
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Mutu pendidik masih rendah	Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Pendidik Kesetaraan sehingga mereka mampu untuk mendidik sesuai standar yang diharapkan	
			Sarana prasarana kurang/belum mencukupi standar minimal	Memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk Lembaga PNFI Pemberian BOP operasional PKBM/SKB/Kejar Paket	

4.2. Bidang Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan, jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan daerah kabupaten/kota terdiri dari 12 jenis pelayanan dasar yaitu :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;



6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

Berdasarkan Permenkes No 4 Tahun 2019, pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh oleh warga negara dilakukan di semua fasilitas pelayanan kesehatan baik fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang- kurangnya memuat:

1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
2. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
3. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

1. ibu hamil untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. ibu bersalin untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. bayi baru lahir untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. balita untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan balita;
5. usia pendidikan dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. usia produktif untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. usia lanjut untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut;



8. penderita hipertensi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. penderita diabetes melitus untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. orang dengan gangguan jiwa berat untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. orang terduga tuberkulosis untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).



4.2.2. Target Capaian SPM

TABEL 4.6
Target Capaian SPM

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI	TARGET CAPAIAN (5) : (4) X 100%	RENCANA ANGGARAN		
						ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REFOCUSING	ANGGARAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan kesehatan terhadap orang penderita diabetes melitus	Pelayanan kesehatan terhadap orang penderita diabetes melitus	14.229	10.605	74,5	550.000.000	450.000.000	450.000.000
2	Pelayanan kesehatan kepada ODGJ	Pelayanan kesehatan kepada ODGJ	3.944	2.259	57,3			
3	Pelayanan kesehatan terhadap penderita hipertensi	Pelayanan kesehatan terhadap penderita hipertensi	196.785	19.828	10,1			
4	Pelayanan orang usia 15 - 59	Pelayanan orang usia 15 – 59	350.199	53.915	15,4			
5	Pelayanan kesehatan terhadap orang dengan resiko HIV	Pelayanan kesehatan terhadap orang dengan resiko HIV	29.376	29.276	99,7	4.131.600.000	4.081.600.000	4.081.600.000



6	Pelayanan kesehatan kepada orang terduga TBC	Pelayanan kesehatan kepada orang terduga TBC	16.932	8.528	50,4			
7	Pelayanan Kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar	Pelayanan Kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar	151.884	59.060	38,9	116.100.000	116.100.000	116.100.000
8	Pelayanan kesehatan warga negara usia 60 tahun keatas	Pelayanan kesehatan warga negara usia 60 tahun keatas	149.949	50.378	33,6	1.520.000.000	911.749.000	1.080.000.000
9	Pelayanan kesehatan balita	Pelayanan kesehatan balita	105.622	77.333	73,2			
10	Pelayanan untuk bayi baru lahir	Pelayanan untuk bayi baru lahir	26.916	26.916	100			
11	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Pelayanan kesehatan ibu hamil	28.727	27.107	94,4			
12	Ibu bersalin mendapatkan pelayanan	Ibu bersalin mendapatkan pelayanan	26.895	26.706	99	3.563.785.000	3.563.785.000	3.563.785.000



Berdasarkan tabel di atas. dapat disimpulkan bahwa dari 12 jenis pelayanan SPM Kesehatan, terdapat 6 jenis pelayanan yang mempunyai target capaian di bawah 70% yaitu pelayanan Kesehatan kepada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sebesar 57,3%, pelayanan Kesehatan terhadap penderita hipertensi sebesar 10,1%, pelayanan orang usia 15-59 tahun 15,4%, pelayanan Kesehatan kepada orang terduga TBC sebesar 50,4%, pelayanan Kesehatan untuk anak usia Pendidikan dasar 38,9%, dan pelayanan Kesehatan warga negara usai 60 tahun ke atas sebesar 33,6 %. Sedangkan 6 pelayanan lainnya mempunyai target di atas 70%.

Dari segi anggaran, untuk tahun anggaran 2020 ada beberapa jenis pelayanan yang tergabung dalam 1 anggaran kegiatan yaitu pelayanan Kesehatan terhadap orang penderita diabetes melitus, pelayanan Kesehatan kepada ODGJ, pelayanan Kesehatan terhadap penderita hipertensi dan pelayanan orang usia 15-59 tahun. Kemudian pelayanan Kesehatan terhadap orang dengan resiko HIV dan pelayanan Kesehatan kepada orang terduga TBC juga masih tergabung dalam 1 anggaran kegiatan. Selanjutnya pelayanan Kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas, pelayanan Kesehatan balita, pelayanan untuk bayi baru lahir dan pelayanan Kesehatan ibu hamil masih tergabung dalam 1 anggaran kegiatan.



4.2.3. Realisasi SPM Kesehatan

TABEL 4.7
Realisasi SPM Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET CAPAIAN SPM		REALISASI SPM			REALISASI CAPAIAN (6):(4)X100%
			JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	RENCANA ANGGARAN	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	REALISASI ANGGARAN		
						APBD	APBD PROV/ APBN/ SUMBER LAIN YANG SAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan kesehatan terhadap orang penderita diabetes melitus	Pelayanan kesehatan terhadap orang penderita diabetes melitus	14.229	450.000.000	10.605	315.769.000	35.582.500	74,5
2	Pelayanan kesehatan kepada ODGJ	Pelayanan kesehatan kepada ODGJ	3.944		2.259			57,3
3	Pelayanan kesehatan terhadap penderita hipertensi	Pelayanan kesehatan terhadap penderita hipertensi	196.785		19.826			10,1
4	Pelayanan orang usia 15 - 59	Pelayanan orang usia 15 – 59	350.199		53.915			15,4



5	Pelayanan kesehatan terhadap orang dengan resiko HIV	Pelayanan kesehatan terhadap orang dengan resiko HIV	29.376	4.081.600.000	29.276	805.374.045	3.156.888.400	99,7
6	Pelayanan kesehatan kepada orang terduga TBC	Pelayanan kesehatan kepada orang terduga TBC	16.932		8.528			50
7	Pelayanan Kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar	Pelayanan Kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar	151.884	116.100.000	59.060	-	116.100.000	38,9
8	Pelayanan kesehatan warga negara usia 60 tahun keatas	Pelayanan kesehatan warga negara usia 60 tahun keatas	149.949	1.080.000.000	50.378	895.616.562	58.474.800	33,6
9	Pelayanan kesehatan balita	Pelayanan kesehatan balita	105.622		77.333			73,2
10	Pelayanan untuk bayi baru lahir	Pelayanan untuk bayi baru lahir	26.916		26.916			100
11	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Pelayanan kesehatan ibu hamil	28.727		27.107			94,4
12	Ibu bersalin mendapatkan pelayanan	Ibu bersalin mendapatkan pelayanan	26.895	3.563.785.000	26.706	-	3.482.481.841	99,3



Berdasarkan tabel realisasi SPM Kesehatan tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat 4 jenis pelayanan yang masih mendapat capaian kurang dari 50% yaitu pelayanan Kesehatan kepada penderita hipertensi 10,1%, pelayanan orang usia 15-59 tahun 15,4%, pelayanan Kesehatan untuk anak usia Pendidikan dasar 38,9%, dan pelayanan Kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas 33,6%.

Sedangkan 8 jenis pelayanan lainnya mendapatkan capaian di atas 50% yaitu Pelayanan kesehatan terhadap orang penderita diabetes melitus 74,5%, Pelayanan kesehatan kepada ODGJ 57,3%, Pelayanan kesehatan terhadap orang dengan resiko HIV 99,7%, Pelayanan kesehatan kepada orang terduga TBC 50%, Pelayanan kesehatan balita 73,2%, Pelayanan untuk bayi baru lahir 100%, Pelayanan kesehatan ibu hamil 94,4%, pelayanan Kesehatan Ibu bersalin 99,3%

4.2.4. Alokasi Anggaran

TABEL 4.8
Alokasi Anggaran

NO	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran
I.	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
1.	Pengadaan BHP Penanggulangan TBC (DAK Fisik)	233.220.000
2.	Pengadaan BHP HIV dan Sifilis (DAK Fisik)	1.525.675.000
3.	Pengadaan Catridge TCM (DAK)	1.347.705.000
4.	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	900.000.000
5.	Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	375.000.000
II.	Program Kesehatan Masyarakat	
1.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK Non Fisik)*	366.100.000
2.	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	3.563.785.000
III.	Program Pelayanan Kesehatan	
1.	Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	3.372.622.000

2.	Kegiatan Pengadaan Obat Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pengadaan Obat Gizi	1.175.000.000
3.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	880.065.000
4.	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Puskesmas (DBHCHT)	150.000.000
5.	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu)	3.460.000.000
IV.	Program Kesehatan Keluarga dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
1.	Kegiatan Kesehatan Keluarga	980.000.000

4.2.5. Dukungan Personil

Dalam upaya pemenuhan SPM Bidang Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal memiliki jumlah SDM yang tertera pada tabel berikut :

TABEL 4.9
Dukungan Personil

Jumlah Pegawai		orang
PNS/CPNS	1124	orang
THL	54	orang
Kualifikasi Pendidikan		orang
Pasca Sarjana / S2	21	orang
Sarjana / S1, D.IV	374	orang
Ahli Madya / D.III	8	orang
Ahli Muda / D.II	-	orang
Ahli Madya / D.1	31	orang
SMA / SLTA	171	orang
SMP / SLTP	18	orang
SD	1	orang
Pangkat dan Golongan		orang



Golongan IV	106	orang
Golongan III	702	orang
Golongan II	403	orang
Golongan I	3	orang
Jumlah Pejabat		orang
Pejabat Struktural	54	orang

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

TABEL 4.10
Permasalahan dan Solusi

N O	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI	KET
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan kesehatan terhadap orang penderita diabetes melitus	Pelayanan kesehatan terhadap orang penderita diabetes melitus	1. Pelaksanaan Posbindu PTM (Penyakit Tidak Menular) ditiadakan selama masa darurat covid 19	pelaksanaan Posbindu PTM setelah status daeurat dicabut, dengan penerapan protokol kesehatan. Dilaksanakan di daerah yang berstatus bukan zona merah	
			2. masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini Penyakit Tidak Menular (PTM)	Melakukan sosialisasi PTM, manfaat posbindu, dan germas melalui pertemuan langsung dengan masyarakat dan iklan layanan masyarakat di media massa	
2	Pelayanan kesehatan terhadap orang dengan	Pelayanan kesehatan terhadap orang dengan	stigma negatif terkait HIV AIDS	sosialisasi HIV utk mengurangi stigma dan diskriminasi di tingkat desa	

	resiko HIV	resiko HIV			
3	Pelayanan kesehatan kepada orang terduga TBC	Pelayanan kesehatan kepada orang terduga TBC	1. pelacakan kasus TB ditiadakan selama masa darurat covid 19	pelacakan kasus TB dengan menerapkan protokol kesehatan setelah masa darurat covid 19	
			2. Belum optimalnya peran serta masyarakat /organisasi masyarakat, dan linsek terkait dalam program pencegahan dan penanggulangan TB	1. penguatan jejaring layanan TB yang melibatkan semua faskes baik pemerintah maupun swasta, ormas, dan linkes terkait. Sdh terbentuk tim DPPM (District Public Private Mix) penanggulangan TB	
				2. Sudah tersusunnya rencana aksi daerah (RAD) penanggulangan TBC tahun 2019 - 2023 yang melibatkan semua sektor terkait	
			3. masih kurangnya kesadaran masyarakat dan penderita TB dalam pencegahan dan penanggulangan TB	1. sosialisasi tentang TB melalui penyuluhan kelompok, di pondok pesantren, perusahaan, kegiatan masyarakat (pengajian)	
				2. screening/deteksi dini penyakit TB di desa dan tempat2 khusus (pontren, perusahaan/pabrik, lapas)	
				3. pembentukan kader khusus TB yang melibatkan ormas	

				(fatayat, Aisyah, PKK)	
4	Pelayanan kesehatan kepada ODGJ	Pelayanan kesehatan kepada ODGJ	masih rendahnya dukungan dan pengetahuan keluarga terhadap pengobatan ODGJ	pertemuan dengan keluarga ODGJ tentang pentingnya dukungan keluarga terhadap pengobatan ODGJ, pembentukan paguyuban keluarga ODGJ, sosialisasi tentang kesehatan jiwa di masyarakat	
5	Pelayanan kesehatan terhadap penderita hipertensi	Pelayanan kesehatan terhadap penderita hipertensi	1. Pelaksanaan Posbindu PTM (Penyakit Tidak Menular) ditiadakan selama masa darurat covid 19	pelaksanaan Posbindu PTM setelah status daeurat dicabut, dengan penerapan protokol kesehatan. Dilaksanakan di daerah yang berstatus bukan zona merah	
			2. masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini Penyakit Tidak Menular (PTM)	Melakukan sosialisasi PTM, manfaat posbindu, dan germas melalui pertemuan langsung dengan masyarakat dan iklan layanan masyarakat di media massa	
6	Pelayanan kesehatan warga negara usia 60 tahun keatas	Pelayanan kesehatan warga negara usia 60 tahun keatas	adanya pandemi covid 19 menyebabkan pelayanan posyandu lansia terhenti pada saat masa darurat covid 19.	1. Pelayanan kesehatan lansia dengan mengoptimalkan pemberdayaan keluarga	
				2. Pelayanan kunjungan rumah bagi lansia yang mengalami kesulita mobilisasi dengan menerapkan protokol kesehatan	

7	Pelayanan orang usia 15 – 59	Pelayanan orang usia 15 - 59	1. Pelaksanaan Posbindu PTM (Penyakit Tidak Menular) ditiadakan selama masa darurat covid 19	pelaksanaan Posbindu PTM setelah status daurat dicabut, dengan penerapan protokol kesehatan. Dilaksanakan di daerah yang berstatus bukan zona merah	
			2. masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini Penyakit Tidak Menular (PTM)	Melakukan sosialisasi PTM, manfaat posbindu, dan germas melalui pertemuan langsung dengan masyarakat dan iklan layanan masyarakat di media massa	
8	Pelayanan Kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar	Pelayanan Kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar	pelayanan ini biasanya dilakukan pada awal tahun ajaran baru, yaitu pada sekitar bulan agustus sampai oktober. Tapi karena adanya pandemi covid 19, belum semua siswa diberi pelayanan kesehatan karena adanya pelarangan aktivitas luar ruangan pada zona merah. puskesmas masih dalam proses merekap laporan dari semua sekolah di wilayah kerjanya.	melaksanakan pelayanan kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan pada wilayah bukan zona merah	
9	Pelayanan kesehatan balita	Pelayanan kesehatan balita	1. adanya pandemi covid 19 menyebabkan pelayanan posyandu balita terhenti pada saat masa darurat covid 19, serta pembatasan pelayanan posyandu setelahnya.	1. pembatasan pelayanan posyandu dengan penerapan protokol kesehatan.	
				2. Pelayanan posyandu berada di luar ruangan menerapkan sistem shifting	
			2. adanya kebijakan pembatasan kontak langsung dengan balita saat pelayanan Kesehatan	Pemenuhan APD untuk pelayanan kesehatan balita	

10	Pelayanan untuk bayi baru lahir	Pelayanan untuk bayi baru lahir	1. adanya pandemi covid 19 menyebabkan pelayanan ibu bersalin dan bayi baru lahir terhambat. Terutama pada puskesmas yang ditutup sementara, atau karena petugas kesehatan yang terkonfirmasi positif covid 19 tidak bisa memberi pelayanan	pelayanan puskesmas PONED dan mampu persalinan tetap dibuka 24 jam	
			2. adanya kebijakan pembatasan kontak langsung dengan bayi baru lahir saat pelayanan kesehatan	Pemenuhan APD untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir	
			3. Masih ada bayi baru lahir yang ditangani dukun bayi	1. Pembinaan dukun bayi	
				2. sosialisasi pentingnya penanganan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan yang kompeten pada keluarga masyarakat	
11	Ibu bersalin mendapatkan pelayanan	Ibu bersalin mendapatkan pelayanan	1. adanya pandemi covid 19 menyebabkan pelayanan ibu bersalin terhambat. Terutama pada puskesmas yang ditutup sementara, atau karena petugas kesehatan yang terkonfirmasi positif covid 19 tidak bisa memberi pelayanan	pelayanan puskesmas PONED dan mampu persalinan tetap dibuka 24 jam	

			2. Keterbatasan ruang isolasi dan ruang bersalin untuk ibu bersalin terkonfirmasi Covid 19 di rumah sakit	1. Pemetaan rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan ibu bersalin terkonfirmasi Covid 19 dengan persalinan normal dan persalinan dengan tindakan	
				2. Penambahan ruang isolasi dan ruang bersalin untuk ibu bersalin terkonfirmasi Covid 19 di rumah sakit	
				3. Pemenuhan APD untuk pelayanan kesehatan ibu bersalin	
			3. Masih ada persalinan yang ditangani dukun bayi	1. Pembinaan dukun bayi melalui kelas ibu hamil dan kunjungan rumah agar tidak lagi menolong persalinan	
				2. sosialisasi pentingnya persalinan di faskes/tenaga kesehatan yang kompeten pada keluarga dan masyarakat	
12	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Pelayanan kesehatan ibu hamil	1. adanya pandemi covid 19 menyebabkan pelayanan posyandu terhenti pada saat masa darurat covid 19, serta pembatasan pelayanan posyandu setelahnya.	pembatasan pelayanan ibu hamil di posyandu dengan penerapan protokol kesehatan. Layanan konseling via daring dan media sosial	
			2. Ibu hamil yang tempat kerjanya berbeda dengan tempat tinggal tidak berkunjung ke Posyandu , sehingga tidak tercatat di kohort	1. Pengadaan Posyandu di tempat kerja	
				2. mewajibkan klinik untuk melapor pada Puskesmas tentang data pasien ibu hamil (bumil) yang diperiksa di klinik tersebut	

			3. adanya kebijakan pembatasan kontak langsung dengan ibu hamil saat pelayanan Kesehatan	Pemenuhan APD untuk pelayanan kesehatan ibu hamil	
--	--	--	--	---	--

4.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jenis Pelayanan Dasar pekerjaan umum pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar ditetapkan dalam dalam standar teknis yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar untuk seitan Jenis Pelayanan Dasar pada bidang urusan Pekerjaan Umum adalah setiap warga negara.

4.3.2. Target Capaian SPM

TABEL 4.11
Target Capaian SPM

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI	TARGET CAPAIAN (5) : (4) X 100%	RENCANA ANGGARAN		
						ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REFOCUSING	ANGGARAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	presentase jumlah masyarakat/rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	290.000	777	0,000026	62.185.000	-	-
2	pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	1.435.147	916.198	63,84	14.982.064.600	5.444.781.000	5.773.369.000



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam memberikan pelayanan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic masih sangat rendah dimana dari 290.000 kepala keluarga, hanya 777 kepala keluarga dapat terlayani kebutuhan pengolahan air limbah domestic. Dan jika dihitung presentasinya kurang dari 1% yaitu 0,000026%.

Sementara untuk jenis pelayanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, Dinas Perkimtaru sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan ini, menargetkan 63,84% masyarakat mendapatkan pelayanan air minum sehari-hari.



4.3.3. Realisasi SPM

TABEL 4.12
Realisasi SPM

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET CAPAIAN SPM		REALISASI SPM			REALISASI CAPAIAN (6):(4)X100%
			JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	RENCANA ANGGARAN	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	REALISASI ANGGARAN		
						APBD	APBD PROV/ APBN/ SUMBER LAIN YANG SAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	presentase jumlah masyarakat/rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	290.000	62.185.000	777	62.185.000	-	0,0026
2	pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	1.435.147	5.773.369.000	916.198	383.369.000	5.390.000.000	63,84



Berdasarkan tabel di atas hasil capaian penyediaan pelayanan air limbah domestic adalah 0,0026% yang didapat dari pembagian 777 kepala keluarga yang mendapatkan layanan dibagi dengan 290.000 kepala keluarga yang berhak mendapatkan layanan. Sedangkan untuk layanan pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari mencapai presentase 63,84%.

4.3.4. Alokasi Anggaran

TABEL 4.13
Alokasi Anggaran

NO	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran
	Program Tata Perumahan dan Permukiman	
1	Kegiatan Penyelenggaraan perumahan dan permukiman	5.773.369.000
	Program Kesehatan Lingkungan	
1	Kegiatan STBM, Sarana sanitasi dasar dan penyehatan lingkungan	62.185.000

4.3.5. Dukungan Personil

Jumlah personil yang mendukung pencapaian SPM urusan pekerjaan umum jenis pelayanan dasar Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah sebagai berikut :

TABEL 4.14
Dukungan Personi

Jumlah Pegawai	10	orang
PNS/CPNS	7	orang



THL	3	orang
Kualifikasi Pendidikan	10	orang
Pasca Sarjana / S2	3	orang
Sarjana / S1, D.IV	5	orang
SMA / SLTA	2	orang
SMP / SLTP	-	orang
Pangkat dan Golongan	10	orang
Golongan IV	2	orang
Golongan III	4	orang
Golongan II	1	orang
Golongan I	-	orang
THL	3	orang
Jumlah Pejabat	10	orang
Pejabat Struktural	4	orang
Pejabat Fungsional	3	orang
THL	3	orang

Jumlah personil yang mendukung pencapaian SPM urusan pekerjaan umum jenis pelayanan dasar pengolahan Air Limbah Domestik adalah sebagai berikut :

TABEL 4.15
Dukungan Personi

Jumlah Pegawai	9	orang
PNS/CPNS	9	orang



Kualifikasi Pendidikan		
Pasca Sarjana / S2	4	orang
Sarjana / S1, D.IV	2	orang
SMA / SLTA	3	orang
SMP / SLTP	-	orang
Pangkat dan Golongan		
Golongan IV	4	orang
Golongan III	2	orang
Golongan II	3	orang
Golongan I	-	orang
Jumlah Pejabat		
Pejabat Struktural	3	orang
Pejabat Fungsional	6	orang

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

TABEL 4.16
Permasalahan dan Solusi

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	presentase jumlah masyarakat/rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	Terbatasnya anggaran untuk mengentaskan perilaku BABS	Bekerjasama dengan pemerintah desa untuk bersama mengentaskan	Tahun 2020 DAK batal karena refocusing



				BABS dengan program jambanisasi menggunakan Dana Desa dan mencari sumber pendanaan lain (DAK)	
2	pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Anggaran yang terkena refocusing untuk penanganan Covid-19 cukup tinggi sehingga mengakibatkan penurunan capaian	Rencana desa-desa yang terkena refocusing akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021	



4.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM bidang urusan Perumahan Rakyat terdiri atas :

1. Penyediaan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkenal relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis Pelayanan Dasar ditetapkan dalam standar teknis dan sekurang-kurangnya memuat :

1. Standar jumlah dan kualitas barang/jasa;
2. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar pada bidang urusan Perumahan Rakyat adalah setiap warga negara, dengan ketentuan:

1. Korban bencana kabupaten yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
2. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

4.4.2. Target Capaian SPM

TABEL 4.17
Target Capaian SPM

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI	TARGET CAPAIAN (5) : (4) X 100%	RENCANA ANGGARAN		
						ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REFOCUSING	ANGGARAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten / kota	Presentase jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	-	-	-	-	-	-
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Presentase jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	11	11	100	132.000.000	132.000.000	132.000.000



Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal tidak memiliki anggaran untuk pelayanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah daerah kabupaten. Sedangkan untuk pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten, Pemerintah Kabupaten Tegal menargetkan dari rencana 11 rumah yang akan di rehabilitasi, dapat diselesaikan semua dalam waktu satu tahun.



4.4.3. Realisasi SPM

TABEL 4.17
Realisasi SPM

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET CAPAIAN SPM		REALISASI SPM			REALISASI CAPAIAN (6):(4)X100%
			JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	RENCANA ANGGARAN	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	REALISASI ANGGARAN		
						APBD	APBD PROV/ APBN/ SUMBER LAIN YANG SAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten / kota	Presentase jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	-	-	-	-	-	-
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Presentase jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	11	132.000.000	11	-	132.000.000	100



Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Kabupaten Tegal tidak menerapkan pelayanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten. Sedangkan untuk pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten, Pemerintah Kabupaten Tegal dapat memenuhi target 100% dimana 11 rumah korban bencana berhasil di rehabilitasi menjadi rumah layak huni.

4.4.4. Alokasi Anggaran

TABEL 4.18
Alokasi Anggaran

NO	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran
	Program Tata Perumahan dan Permukiman	
1	Kegiatan pembangunan tata perumahan dan permukiman	132.000.000

4.4.5. Dukungan Personil

Jumlah personil yang mendukung pencapaian SPM bidang urusan perumahan rakyat adalah sebagai berikut:

TABEL 4.19
Dukungan Personil

Jumlah Pegawai	10	orang
PNS/CPNS	7	orang
THL	3	orang
Kualifikasi Pendidikan	10	orang
Pasca Sarjana / S2	3	orang

Sarjana / S1, D.IV	5	orang
SMA / SLTA	2	orang
SMP / SLTP	-	orang
Pangkat dan Golongan	10	orang
Golongan IV	2	orang
Golongan III	4	orang
Golongan II	1	orang
Golongan I	-	orang
THL	3	orang
Jumlah Pejabat	10	orang
Pejabat Struktural	4	orang
Pejabat Fungsional	3	orang
THL	3	orang

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

TABEL 4.20
Permasalahan dan Solusi

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI	KET
1	2	3	4	5	6
1	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi	Presentase jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah	-Tidak ada masyarakat yang rumahnya terkena relokasi program pemerintah -Belum tersedianya anggaran APBD	- Anggaran yang bersumber dari APBD	



	program pemerintah daerah daerah kabupaten / kota	Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	untuk menangani penyediaan rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah	untuk menangani pelayanan ini akan diusulkan pad tahun berikutnya	
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Presentase jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	- Kurangnya data kerusakan rumah korban bencana - Belum tersedianya anggaran APBD untuk menangani rehab rumah bagi korban bencana	- Pengumpulan data terkait korban bencana akan lebih ditingkatkan dengan melibatkan OPD terkait lainnya - Anggaran yang bersumber dari APBD untuk menangani pelayanan ini akan diusulkan pada tahun berikutnya	

4.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Permendagri 102 Tahu 2018 Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) kabupaten//kota terdiri atas :

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Mutu Pelayanan Dasar berdasarkan Permendagri 102 Tahun 2018 ditetapkan dalam standar teknis yang sekurang-kurangnya memuat:

1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa
2. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia
3. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar



Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu warga negara, dengan ketentuan :

1. Yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
3. Yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.



4.5.2. Target Capaian SPM

TABEL 4.21
Target Capaian SPM

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI	TARGET CAPAIAN (5) : (4) X 100%	RENCANA ANGGARAN		
						ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REFOCUSING	ANGGARAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1.623.923	1.000	0,0616%	3.500.000.000	1.623.331.000	1.811.303.000
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	233.597	52.002	22,26%	630.000.000	393.144.000	393.144.000



3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	584.336	8.070	1,38%	2.351.998.000	1.356.131.000	1.356.131.000
4	Pelayanan informasi rawan bencana	Presentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	584.336	379.828	65%	477.802.000	32.600.000	32.600.000
5	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	-	-	-	-	-	-



Berdasarkan tabel di atas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal sebagai perangkat daerah yang melaksanakan jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, merencanakan dapat melayani 1000 orang dari 1.623.923 orang yang membutuhkan pelayanan atau jika diprosentasikan menjadi 0,0616%. Dimana dari anggaran awal sebesar Rp. 3,500.000.000 mengalami refocusing dan perubahan yang akhirnya untuk jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.811.303.000.

BPBD Kabupaten Tegal sebagai perangkat daerah menyelenggarakan 3 jenis pelayanan berikutnya yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan Pelayanan informasi rawan bencana. Pada pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, BPBD memasang target 22,26% dengan anggaran awal 630.000.000. Setelah mengalami refocusing menjadi 393.144.000 dan tidak mengalami perubahan anggaran. Sebanyak 8.070 orang dari 584.336 orang dapat terlayani dalam pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana atau jika diprosentasikan hanya 1,38%. Sedangkan untuk pelayanan informasi rawan bencana memasang target 65%.

Jenis pelayanan berikutnya yaitu Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum dengan indicator capaian presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada. , Pada perencanaan tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Tegal tidak menganggarkan untuk melaksanakan jenis pelayanan ini.

4.5.3. Realisasi SPM

TABEL 4.22
Realisasi SPM

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET CAPAIAN SPM		REALISASI SPM			REALISASI CAPAIAN (6):(4)X100%
			JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	RENCANA ANGGARAN	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	REALISASI ANGGARAN		
						APBD	APBD PROV/ APBN/ SUMBER LAIN YANG SAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1.623.923	3.500.000.000	1.000	1.725.734.239	-	0,06160
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	233.597	393.144.000	52.002	301.887.278	-	22,26



3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	584.336	1.356.131.000	8.070	1.133.317.010	-	1,38
4	Pelayanan informasi rawan bencana	Presentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	584.336	32.600.000	379.828	29.475.152	-	65
5	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	-	-	-	-	-	-



Berdasarkan tabel realisasi SPM Trantibumlinmas, dapat dilihat bahwa Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran mendapat capaian 0,616%, Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana mendapat capaian 22,26%, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 1,38%, dan Pelayanan informasi rawan bencana 65%. Sedangkan untuk Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum tidak diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun anggaran 2020.

4.5.4. Alokasi Anggaran

TABEL 4.23
Alokasi Anggaran

NO	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran
	Program Perlindungan Masyarakat dan Pemadaman Kebakaran	
1	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	1.800.000.000,-
2	Pengadaan Kendaraan Operasional	1.700.000.000,-
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	
1	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	361.181.000
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Mitigasi dan Komunikasi	0
3	Koordinasi dan Fasilitasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	34.000.000
4	Pemetaan dan Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana	16.170.000
	Program Penanganan Kedaruratan, Peralatan dan Logistik Bencana	

1	Penanganan Tanggap Darurat, Bantuan Peralatan dan Logistik Korban Bencana	99.050.000
2	Peningkatan Kompetensi Personil dan Masyarakat Dalam Penanganan Tanggap Darurat Bencana	0
3	Optimalisasi Pusat Pengendalian dan Operasional (Pusdalops)	62.880.000
4	Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana, Peralatan dan Logistik Bencana	193.180.000
5	Koordinasi dan Fasilitasi Tanggap Darurat Bencana	22.500.000
6	Penyusunan Peraturan dan SOP Penanganan Kedaruratan, Peralatan dan Logistik Bencana Kajian Penanganan Kedaruratan,, Peralatan dan Logistik Bencana	15.534.000
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	
1	pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana	52.278.000
2	Peningkatan Kompetensi Aparatur dan Masyarakat Dalam Rehabilitasi Pasca Bencana	0
3	Stimulan Perbaikan Perumahan Pasca Bencana	0
4	Perbaikan Infrastruktur dan Perumahan Terdampak Bencana	790.167.000
5	Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Kerusakan Pasca Bencana	25.625.000
6	Penyusunan Peraturan, SOP dan Kajian Penanganan Pasca Bencana	109.310.000



4.5.5. Dukungan Personil

Personil yang tersedia untuk jenis pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum yaitu sebagai berikut:

TABEL 4.24
Dukungan Personil

Jumlah Pegawai	8	orang
PNS/CPNS	5	orang
PTT	3	orang
Kualifikasi Pendidikan		
Pasca Sarjana / S2	-	orang
Sarjana / S1, D.IV	5	orang
SMA / SLTA	3	orang
SMP / SLTP	-	orang
Pangkat dan Golongan		
Golongan IV	-	orang
Golongan III	5	orang
Golongan II	-	orang
Golongan I	-	orang
PTT	3	orang
Jumlah Pejabat		
Pejabat Struktural	3	orang
Pejabat Fungsional	2	orang
PTT	3	orang

Jumlah personil untuk Jenis Pelayanan Dasar informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebagai berikut :

TABEL 4.25
Dukungan Personil

Jumlah Pegawai	43	orang
PNS/CPNS	31	orang
THL	12	orang
Kualifikasi Pendidikan		
Pasca Sarjana / S2	4	orang
Sarjana / S1, D.IV	11	orang
Ahli Madya / D.III	2	orang
Ahli Muda / D.II	3	orang
Ahli Madya / D.1	-	orang
SMA / SLTA	19	orang
SMP / SLTP	4	orang
Pangkat dan Golongan		
Golongan IV	6	orang
Golongan III	13	orang
Golongan II	12	orang
Golongan I	-	orang
THL	12	orang
Jumlah Pejabat		
Pejabat Struktural	11	orang



Pejabat Fungsional	20	orang
THL	12	orang

Jumlah personil untuk Jenis Pelayanan Dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah sebagai berikut :

TABEL 4.26
Dukungan Personil

Jumlah Pegawai	45	orang
PNS/CPNS	7	orang
PTT	7	orang
THL	31	orang
Kualifikasi Pendidikan		
Pasca Sarjana / S2	1	orang
Sarjana / S1, D.IV	4	orang
SMA / SLTA	2	orang
SMP / SLTP	-	orang
Pangkat dan Golongan		
Golongan IV	1	orang
Golongan III	4	orang
Golongan II	2	orang
Golongan I		orang
PTT	7	orang
THL	31	orang
Jumlah Pejabat		

Pejabat Struktural	3	orang
Pejabat Fungsional	4	orang
PTT	7	orang
THL	31	orang

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

TABEL 4.27
Permasalahan dan Solusi

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	<p>Kurangnya Sarana Prasarana Damkar yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Pos Sektor Damkar, dengan WMK Kab. Tegal, idealnya harus ada 8 Pos Sektor, yang dipunyai sekarang hanya 4 Pos - Jumlah Armada, idealnya per Pos minimal mempunyai 2 armada, shg dengan 4 Pos sekarang ini, idealnya mempunyai 8 Armada, sedang sekarang hanya mempunyai 4 unit armada 	Penambahan Sarana dan Prasarana yang mendukung agar pelayanan lebih optimal	Karena keterbatasan anggaran, di 5 tahun kedepan blm ada perencanaan di penganggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana tersebut



2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kegiatan masih bisa berjalan, walaupun ada keterbatasan anggaran karena refocusing	Dianggarkan kembali di Tahun Anggaran 2021	
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kegiatan yang mengundang kerumuman tidak diperbolehkan, sehingga kegiatan sosialisai juga terdampak rrefocusing	Dianggarkan kembali di Tahun Anggaran 2021	
4	Pelayanan informasi rawan bencana	Presentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Anggaran penyusunan Dokumen KRB terdampak refocusing, sehingga tidak tersusun, dan Kegiatan yang mengundang kerumuman tidak diperbolehkan, sehingga kegiatan sosialisai juga terdampak rrefocusing	Dianggarkan kembali di Tahun Anggaran 2021	
5	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Di Perencanaan Penganggaran belum muncul untuk Pelayanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Dimunculkan di Perencanaan Penganggaran berikutnya	



4.6. Bidang Urusan Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang social di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, jenis pelayanan dasar pada SPM bidang social di daerah kabupaten/kota terdiri atas :

1. Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti social;
2. Rehabilitasi social dasar anak terlantar di luar panti social;
3. Rehabilitasi social dasar Lanjut Usia telantar di luar panti social;
4. Rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti social;
5. Perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang- kurangnya memuat:

1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
2. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan
3. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

1. penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
2. anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi social dasar anak telantar di luar panti;
3. lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi social dasar lanjut usia telantar di luar panti;
4. gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;



5. korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota



4.6.2. Target Capaian SPM

TABEL 4.28
Target Capaian SPM

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI	TARGET CAPAIAN (5) : (4) X 100%	RENCANA ANGGARAN		
						ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REFOCUSING	ANGGARAN PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten /kota	506	506	100%	100.000.000	81.900.000	81.900.000
2	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	15	15	100%	470.000.000	148.083.000	230.238.000



3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	59	59	100%	524.800.000	223.323.000	223.323.000
4	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	56	56	100%	524.800.000	223.323.000	223.323.000
5	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	247	247	100%	1.352.510.000	379.314.000	461.469.000



Tabel target capaian SPM Bidang Sosial di atas menargetkan capaian 100% untuk semua jenis pelayanan spm bidang sosial. Meskipun semua anggaran awal dikurangi karena ada refocusing dan perubahan anggaran, tidak mengubah target awal jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota, Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial, Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial, Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial, dan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial.



4.6.3. Realisasi SPM

TABEL 4.29
Realisasi SPM

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET CAPAIAN SPM		REALISASI SPM			REALISASI CAPAIAN (6):(4)X100%
			JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	RENCANA ANGGARAN	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	REALISASI ANGGARAN		
						APBD	APBD PROV/ APBN/ SUMBER LAIN YANG SAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase (%)korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten /kota	506	100.000.000	506	81.900.000	16.722.760	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	15	470.000.000	15	230.238.000	-	100%



3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	59	524.800.000	59	223.323.000	-	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	56	524.800.000	56	223.323.000	-	100%
5	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	248	1.352.510.000	248	461.469.000	10 Kursi Roda (Basnas)	100%
							74.000.000 (APBN)	



Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa semua jenis pelayanan dalam SPM bidang sosial di Kabupaten Tegal 100% diterapkan dengan baik. Hal ini tidak lepas dari dukungan anggaran dari pusat maupun organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten Tegal.

4.6.4 Alokasi Anggaran

TABEL 4.30
Alokasi Anggaran

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
	Program Rehabilitasi Sosial	
1	Rehabilitasi Sosial Bagi Anak dan Usia Lanjut	223.323.000
2	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial	230.238.000
3	Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Operasional LBK (DBHCHT)	231.231.000
4	Penyediaan Sarpras Difable	382.510.000
5	Bantuan Alat Bantu Protesa (tangan dan kaki palsu)	
	Dari Yayasan Sosial Putra Kusuma Cirebon	
6	Bantuan Sosial Kegiatan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial bagi Eks Psycotik 20 UNIT	
	Diberikan Modal Usaha melalui rekening PM masing- masing sebesar Rp 2.500.000; dari Kemensos RI	
7	Bantuan Sosial Kegiatan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial bagi Eks PSK	
	Diberikan Modal Usaha melalui rekening PM masing- masing sebesar Rp 4.500.000; dari Kemensos RI	
8	Fasilitasi Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terhadap ODKB	
	Bantuan Kebutuhan dasar, masing- masing Rp 2 jt/ tahun dari Kemnesos RI	
9	Bantuan Asistensi bagi Penyandang Disabilitas	



	Bantuan Kebutuhan dasar, masing- masing Rp 2 jt/ tahun dari Kemnesos RI	
10	Bantuan Untuk Penyandang Disabilitas	
	Bantuan Kebutuhan dasar, dari Dinas Sosial Prov. Jateng 404 Paket	
11	Bantuan Untuk Penyandang Disabilitas	
	Bantuan Kebutuhan dasar, dari Kementerian Sosial RI 50 Paket	
12	Bantuan Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Operasional LBK (DBHCHT)	
	Bantuan paket sembako 404 paket	
	Bantuan sembako 50 Paket	
	Bantuan ASPD 37 PM @ 2.000.000	
13	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
	Kegiatan Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Kebencanaan	81.900.000
14	Bantuan untuk korban bencana Alam	
	Bantuan makanan anak 30 paket @ 59.532	
	Bantuan mie instan 600 bungkus @ 2.006	
15	Bantuan untuk korban bencana alama	
	Bantuan peralatan evakuasi (Tenda gulung,velbed,kasur)	
	Tenda gulung 10 lembar @ 175.560	
	velbed 5 unit @ 708.009	
	kasur 10 Buah @ 426.360	
16	Bantuan untuk korban bencana alama	
	Bantuan peralatan keluarga foodware 5 paket @ 384.191	
17	Bantuan untuk korban bencana alam	
	Bantuan beras reguler sejumlah 300 kg @10.510	
18	Bantuan untuk korban bencana alam	
	Bantuan perlindungan diri (APD) 100 stel @ 200.700	
	Bantuan Disinfektan 5 Liter (5 pcs) @ 1.280.000	

	Bantuan semprot Disinfektan (3 unit) @ 1.130.000	
	Bantuan saryng tangan medis (21 Dus) @ 211.850	
	Bantuan sosialisasi covid 19 (43 buah) @ 10.600	
	JUMLAH	1.149.202.000

4.6.5. Dukungan Personil

Jumlah personil yang ada untuk mendukung pencapaian SPM Sosial adalah sebagai berikut :

TABEL 4.31
Dukungan Personil

Jumlah Pegawai		Orang
PNS/CPNS	29	Orang
Kualifikasi Pendidikan		
Pasca Sarjana / S2	9	Orang
Sarjana / S1, D.IV	9	Orang
SMA / SLTA	9	Orang
SMP / SLTP	2	Orang
Pangkat dan Golongan		
Golongan IV	8	Orang
Golongan III	13	Orang
Golongan II	6	Orang
Golongan I	2	Orang
Jumlah Pejabat		

Pejabat Struktural	13	Orang
Pejabat Fungsional	-	Orang

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

TABEL 4.31
Permasalahan dan Solusi

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3	4	5
1	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Belum sinkronnya aturan yang terkait dengan rekomendasi pernyataan keadaan darurat bencana kabupaten sehingga menyulitkan dalam penanganan bencana secara cepat	Koordinasi lintas sektor
			Penyediaan pangan sandang, shelter dan layanan dukungan psikososial belum teralokasi secara optimal masih mengandalkan bantuan dari kemensos dan dinas sosial provinsi serta pihak ketiga / masyarakat	Usulan penambahan anggaran
			Sumber daya manusia bidang perlindungan sosial korban bencana terbatas terutama Tagana Siaga Bencana,	Usulan rekrutmen Tagana dan Tenaga Pelopor Perdamaian, dan petugas serta sarana dan prasarana penunjang



			Tenaga Pelopor perdamiaan dan Staf Perlinsos untuk petugas gudang logistik	
			Gudang logistik dinas sosial tidak representatif dan tidak sesuai standar gudang serta sarana dan prasarana penunjang kurang memadai	Usulan rehabilitasi gudang logistik yang layak dan memadai
2	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Kurangnya perhatian dari keluarga	Adanya campur tangan peran pemerintah daerah
			Banyaknya pengemis dan pengamen di jalanan	Razia dari Satpol PP
				Dikirim ke panti Rehabsos
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Adanya Lansia yang tidak mau di rujuk ke panti jompo	Bimbingan pada keluarga
4	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Adanya anak - anak panak di jalan	Bimbingan dan di kembalikan pada keluarga
5	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Banyak disabilitas yang belum mendapatkan pelayanan karena terbatasnya panti yang melayani permasalahan tersebut	Pemberian bantuan kebutuhan dasar dan motivasi pada keluarga

4.7. Program dan Kegiatan

4.7.1. Urusan Pendidikan

TABEL 4.33
Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
	Program Sarana dan Prasarana (Dikdas)		
1	Pembangunan RKB, Ruang Perpustakaan, Laboratorium dan Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Kebudayaan	9.786.440.000	9.509.972.786
2	Manajemen, Pembinaan, Fasilitasi dan Tata Kelola Sarpras Dikbud	1.055.056.000	1.047.584.500
3	Rehabilitasi Ruang Kelas Ruang penunjang Lain dan Peningkatan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	1.495.838.000	1.447.892.709
4	Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi Sarpras SD (DAK FISIK)	9.326.089.000	9.291.416.000
5	Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi Sarpras SMP (DAK FISIK)	6.531.107.000	6.166.550.000
	Program Dikdas		
1	Pemberian Beasiswa SD SMP	1.000.000.000	980.607.280
2	Pelaksanaan Ujian	199.787.000	182.966.892
3	Lomba Kreatifitas, Apresiasi, Pengembangan Minat dan Bakat Siswa SD SMP	45.767.000	45.142.000
	Program Dikdas (Sumber APBN)		
1	Bantuan Operasional Sekolah SD dan SMP	155.464.189.000	155.402.619.210
	Program PPTK (Dikdas)		
1	Managemen, Pengelolaan, dan pembinaan Pendidikan Dasar	1.547.500.000	1.142.216.000
2	Managemen, Fasilitasi dan Tata Kelola Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	28.719.030.000	28.687.493.240
3	Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Guru	80.318.000	79.768.000
4	Penilaian, Pengembangan dan Peningkatan Karier dan Prestasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	187.700.000	174.134.900



	Program Sarana dan Prasarana (PAUD)		
1	Pengadaan/Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana PAUD (DAK FISIK)	223.680.000	55.219.960
	Program Sarana dan Prasarana (PPAUDNI)		
1	Penataan Lingkungan dan Sanitasi PAUD/DIKMAS, Pendidikan dan Kebudayaan	3.672.499.000	3.622.779.606
	Program PPAUDNI		
1	Pengadaan /Pembangunan /Rehabilitasi Sarpras SKB SPNF (DAK FISIK)	2.147.795.000	2.018.413.380
2	BOP PAUD Negeri (DAK Non Fisik)	129.600.000	123.000.000
3	Penyelenggaraan Semesteran dan Ujian Pendidikan Kesetaraan	184.500.000	171.096.631
4	DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan SKB SPNF Negeri Kab. Tegal (Paket B)	75.000.000	75.000.000
5	DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan SKB SPNF Negeri Kab. Tegal (Paket C)	270.000.000	270.000.000
6	Manajemen, Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Nonformal dan Informal	1.095.000.000	796.412.650

4.7.2. Urusan Kesehatan

TABEL 4.34
Program dan Kegiatan

NO	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
I.	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
1.	Pengadaan BHP Penanggulangan TBC (DAK Fisik)	233.220.000	232.995.600
2.	Pengadaan BHP HIV dan Sifilis (DAK Fisik)	1.525.675.000	1.525.293.000
3.	Pengadaan Catridge TCM (DAK)	1.347.705.000	1.347.704.800
4.	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	900.000.000	805.374.045
5.	Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	375.000.000	315.769.000



II.	Program Kesehatan Masyarakat		
1.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK Non Fisik)*	366.100.000	261.052.300
2.	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	3.563.785.000	3.482.481.841
III.	Program Pelayanan Kesehatan		
1.	Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	3.372.622.000	3.318.718.584
2.	Kegiatan Pengadaan Obat Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pengadaan Obat Gizi	1.175.000.000	1.068.768.216
3.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	880.065.000	873.020.400
4.	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Puskesmas (DBHCHT)	150.000.000	141.313.000
5.	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu)	3.460.000.000	3.351.720.000
IV.	Program Kesehatan Keluarga dan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
1.	Kegiatan Kesehatan Keluarga	980.000.000	895.616.562

4.7.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

TABEL 4.35
Program dan Kegiatan

NO	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
	Program Tata Perumahan dan Permukiman		
1	Kegiatan Penyelenggaraan perumahan dan permukiman	5.773.369.000	5.773.369.000
	Program Kesehatan Lingkungan		
1	Kegiatan STBM, Sarana sanitasi dasar dan penyehatan lingkungan	62.185.000	62.185.000

4.7.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

TABEL 4.36
Program dan Kegiatan

NO	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
	Program Tata Perumahan dan Permukiman		
1	Kegiatan pembangunan tata perumahan dan permukiman	132.000.000	132.000.000

4.7.5. Urusan Trantibumlinmas

TABEL 4.37
Program dan Kegiatan

NO	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
	Program Perlindungan Masyarakat dan Pemadaman Kebakaran		
1	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	1.800.000.000,-	1.714.431.300,-
2	Pengadaan Kendaraan Operasional	1.700.000.000,-	11.302.939,-
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana		
1	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	361.181.000	259.212.700
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Mitigasi dan Komunikasi	0	
3	Koordinasi dan Fasilitasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	34.000.000	22.526.710

4	Pemetaan dan Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana	16.170.000	13.045.152
	Program Penanganan Kedaruratan, Peralatan dan Logistik Bencana		
1	Penanganan Tanggap Darurat, Bantuan Peralatan dan Logistik Korban Bencana	99.050.000	83.372.600
2	Peningkatan Kompetensi Personil dan Masyarakat Dalam Penanganan Tanggap Darurat Bencana	0	
3	Optimalisasi Pusat Pengendalian dan Operasional (Pusdalops)	62.880.000	55.130.178
4	Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana, Peralatan dan Logistik Bencana	193.180.000	133.025.000
5	Koordinasi dan Fasilitasi Tanggap Darurat Bencana	22.500.000	16.004.500
6	Penyusunan Peraturan dan SOP Penanganan Kedaruratan, Peralatan dan Logistik Bencana Kajian Penanganan Kedaruratan,, Peralatan dan Logistik Bencana	15.534.000	14.355.000
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana		
1	pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana	52.278.000	16.346.100
2	Peningkatan Kompetensi Aparatur dan Masyarakat Dalam Rehabilitasi Pasca Bencana	0	
3	Stimulan Perbaikan Perumahan Pasca Bencana	0	
4	Perbaikan Infrastruktur dan Perumahan Terdampak Bencana	790.167.000	730.527.000
5	Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Kerusakan Pasca Bencana	25.625.000	18.864.000
6	Penyusunan Peraturan, SOP dan Kajian Penanganan Pasca Bencana	109.310.000	102.270.500



4.7.6. Urusan Sosial

TABEL 4.37
Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	KETERANGAN
	Program Rehabilitasi Sosial			
1	Rehabilitasi Sosial Bagi Anak dan Usia Lanjut	223.323.000	222.128.000	APBD II
2	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial	230.238.000	218.061.096	APBD II
3	Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Operasional LBK (DBHCHT)	231.231.000	228.845.250	APBD II
4	Penyediaan Sarpras Difable	382.510.000	-	APBD II/REFOCUSING
5	Bantuan Alat Bantu Protesa (tangan dan kaki palsu)			
	Dari Yayasan Sosial Putra Kusuma Cirebon			
6	Bantuan Sosial Kegiatan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial bagi Eks Psycotik 20 UNIT			
	Diberikan Modal Usaha melalui rekening PM masing-masing sebesar Rp 2.500.000; dari Kemensos RI		7.500.000	Kemensos RI
7	Bantuan Sosial Kegiatan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial bagi Eks PSK			
	Diberikan Modal Usaha melalui rekening PM masing-masing sebesar Rp 4.500.000; dari Kemensos RI		22.500.000	Kemensos RI
8	Fasilitasi Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terhadap ODKB			
	Bantuan Kebutuhan dasar, masing- masing Rp 2 jt/ tahun dari Kemnesos RI		20.000.000	Kemensos RI
9	Bantuan Asistensi bagi Penyandang Disabilitas			
	Bantuan Kebutuhan dasar, masing- masing Rp 2 jt/ tahun dari Kemnesos RI		74.000.000	



10	Bantuan Untuk Penyandang Disabilitas			
	Bantuan Kebutuhan dasar, dari Dinas Sosial Prov. Jateng 404 Paket			Prov. Jateng
11	Bantuan Untuk Penyandang Disabilitas			
	Bantuan Kebutuhan dasar, dari Kementerian Sosial RI 50 Paket			Kemensos RI
12	Bantuan Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Operasional LBK (DBHCHT)			
	Bantuan paket sembako 404 paket			Provinsi
	Bantuan sembako 50 Paket			kemensos
	Bantuan ASPD 37 PM @ 2.000.000		74.000.000	kemensos
13	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			
	Kegiatan Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Kebencanaan	81.900.000	64.064.500	APBD II
14	Bantuan untuk korban bencana Alam			
	Bantuan makanan anak 30 paket @ 59.532		1.785.960	Dinsos Provinsi
	Bantuan mie instan 600 bungkus @ 2.006		1.203.600	Dinsos Provinsi
15	Bantuan untuk korban bencana alama			
	Bantuan peralatan evakuasi (Tenda gulung, velbed, kasur)			
	Tenda gulung 10 lembar @ 175.560		1.755.600	Dinsos Provinsi
	velbed 5 unit @ 708.009		3.540.045	Dinsos Provinsi
	kasur 10 Buah @ 426.360		4.263.600	Dinsos Provinsi
16	Bantuan untuk korban bencana alama			
	Bantuan peralatan keluarga foodware 5 paket @ 384.191		1.020.955	Dinsos Provinsi
17	Bantuan untuk korban bencana alam			
	Bantuan beras reguler sejumlah 300 kg @10.510		3.153.000	Dinsos Provinsi
18	Bantuan untuk korban bencana alam			
	Bantuan perlindungan diri (APD) 100 stel @ 200.700		20.070.000	Dinsos Provinsi



	Bantuan Disinfektan 5 Liter (5 pcs) @ 1.280.000		6.400.000	Dinsos Provinsi
	Bantuan semprot Disinfektan (3 unit) @ 1.130.000		3.390.000	Dinsos Provinsi
	Bantuan saryng tangan medis (21 Dus) @ 211.850		4.448.850	Dinsos Provinsi
	Bantuan sosialisasi covid 19 (43 buah) @ 10.600		455.800	Dinsos Provinsi
	JUMLAH	1.149.202.000	982.586.256	

